



Buletin

Parlementaria

Nomor 1038/IV/I/2019 • Januari 2019



DPR Pastikan Optimalisasi Produksi PLTA Sigura-Gura



Netralitas TNI dan Polri pada
Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Hlm. 3

Penanganan Bencana Alam
Dinilai Lambat

Hlm. 4

DPR Pastikan Optimalisasi Produksi PLTA Sigura-Gura

Penyusutan permukaan air Danau Toba yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu sempat mengganggu optimalisasi kapasitas produksi listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura. Hal ini tentu saja akan berdampak pada sektor lainnya yang bergantung pada pasokan listrik dari PLTA Sigura-Gura tersebut.

Sehubungan dengan persoalan itu, Komisi VII DPR RI menyambangi PT. Inalum (Persero) selaku pengelola operasional PLTA Sigura-Gura di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, guna memastikan kondisi terkini secara langsung di lapangan.

“Keberadaan PT Inalum sangatlah penting. Dua tahun yang lalu, Inalum tidak dapat berproduksi secara optimal akibat kondisi permukaan Danau Toba yang tengah mengalami penyusutan. Namun kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik, meskipun belum mencapai situasi yang ideal,” ucap Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu disela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau PLTA Sigura-Gura, Toba Samosir, Sumut, Rabu (23/1).

Gus Irawan mengatakan, belakangan ini curah hujan yang turun memang cukup

ekstrem, sehingga membantu kondisi yang ada. Namun demikian, sambung legislator Partai Gerindra ini, dalam jangka panjang, semestinya hutan-hutan yang kritis dan gundul di seputaran Danau Toba harus segera mendapatkan solusi. Penanaman pohon seluas 1000 hektar lahan oleh PT. Inalum pun dirasa belum cukup.

“Oleh karenanya kita mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan lahan-lahan yang kritis dan gundul, utamanya yang berada di sekitar Danau Toba, agar permukaan air Danau Toba bisa memenuhi kapasitas maksimal yang dibutuhkan oleh Inalum. Kita ingin ada solusi permanen di seputaran Danau Toba,” dorong Gus Irawan.

Dalam kesempatan yang sama, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara itu meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

agar kawasan seputar Danau Toba menjadi daerah yang termasuk bagian dari program tanam 4 juta pohon KLHK.

Seperti diketahui, PLTA Sigura-Gura memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Inalum (Persero). Pada tahun 2015 volume produksi tercatat 257.149 ton, namun di tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 245.483 ton atau turun sebesar 4,5 persen.

Hal ini disebabkan karena turunnya kapasitas produksi akibat PLTA Sigura-Gura, dan tidak bisa dioperasikan secara optimal yang disebabkan suplai atau debit air Danau Toba. Pada tahun 2015 tinggi permukaan air Danau Toba adalah 904,77 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan pada tahun 2016 turun menjadi 902,93 atau 0,2 persen.

Sementara itu dalam sambutannya di hadapan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI, Direktur Utama PT. Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan apresiasinya atas dukungan Komisi VII DPR RI, karena akhirnya saham PT. Inalum sepenuhnya kembali menjadi milik Bangsa Indonesia, setelah sebelumnya dikuasai oleh Jepang.

Budi juga meminta agar Komisi VII DPR RI ikut mendukung program PT. Inalum terkait penanaman kembali pohon di lahan kritis, akibat penebangan pohon yang dilakukan pihak lain.

■ dep/sf



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meninjau PLTA Sigura-Gura, Sumut

Foto: Dep/ik

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berfoto dengan peserta Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) TNI Angkatan Laut

Foto: Oji/sf

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu.

Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (UU TNI).

Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu menambahkan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya.

“Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI,” ujar Bamsuet saat mengisi kuliah umum ‘Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu,’ dihadapan peserta Sekolah Staf dan Komando (seskoal) TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Senin (21/1).

Hadir dalam kuliah umum ini antara lain Komandan Seskoal Laksda TNI Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Tatit Eko, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, para pejabat Seskoal serta ratusan peserta didik Seskoal TNI.

Bamsuet menambahkan, UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang

pertama yang mengatur netralitas TNI pasca reformasi. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan,” tandas Bamsuet.

Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, politisi Partai Golkar ini menuturkan, DPR RI setiap tahunnya selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI. Baik untuk penguatan kelembagaan, sarana prasarana, alutsista serta pendidikan dan latihan.

“Menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak pendidikan di akademi militer, maupun dalam jenjang pendidikan dan latihan berikutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” urai Bamsuet.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, legislator dapil Jawa Tengah VII ini menerangkan bahwa DPR RI memberikan alokasi khusus bagi TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam meningkatkan keamanan Pemilu.

“Namun demikian, DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah diberikan kepada TNI, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Karena memperkuat

profesionalisme TNI merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI dalam politik,” terang Bamsuet.

Dalam konteks bela negara, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengingatkan kesiapan TNI menghadapi *psywar* dan *proxy war*, karena ancaman perang saat ini bukan lagi perang fisik. Tetapi, lebih kepada perang ideologi dan teknologi yang disebarkan melalui dunia maya, baik berupa hoaks ataupun ujaran kebencian.

“Mengobrak-abrik sebuah negara tidak lagi harus melalui agresi militer semata. Namun, cukup dengan mengobrak abrik melalui penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. TNI harus membuka mata terhadap hal ini dan ikut dalam perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian,” tegas Bamsuet.

Selain itu, Bamsuet juga mengingatkan potensi ancaman penjajahan asing terhadap bangsa Indonesia. Kini menguasai Indonesia tidak perlu dengan menggunakan kekuatan militer, cukup dengan menguasai dan mempengaruhi partai-partai politik. Sudah menjadi rahasia umum, karena pembiayaan partai politik tidak sepenuhnya disokong negara melalui APBN, maka partai politik sangat rawan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, baik dalam maupun luar negeri,

“Jika para elitnya tidak dibekali kecintaan terhadap merah putih, NKRI serta berjiwa nasionalisme yang tinggi. Sebab, mengelola partai politik dibutuhkan dana yang sangat besar. Disinilah peran TNI diperlukan sebagai penjaga terakhir benteng kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkas Bamsuet. ■ oji/sf

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai penanganan pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia masih lambat.

Selain itu, masih kurangnya penyampaian informasi kebencanaan yang tepat kepada masyarakat, membuat korban bencana alam semakin banyak.

“Saya lihat dalam beberapa bencana alam belakangan ini penanganan pemerintah masih lambat. Informasi-informasi yang disediakan oleh lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang tepat itu tidak terjadi,” jelas Fadli kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, penyampaian informasi yang tidak tepat seperti kejadian tsunami di Banten. Seharusnya bisa terdeteksi, namun penyampaian informasi itu tidak

terjadi. Sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Padahal, seharusnya Indonesia mempunyai alat pendeteksi tsunami yang baik.

“Ini bisa diminimalkan apabila mempunyai alat pendeteksi tsunami. Masa negara besar seperti Indonesia tidak mampu mendeteksi tsunami dan ternyata juga banyak alat-alat pendeteksinya yang tidak berfungsi,” imbuh legislator dapil Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Fadli juga mengkritisi sikap pemerintah yang memotong anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi

“Saya lihat dalam beberapa bencana alam belakangan ini penanganan pemerintah masih lambat. Informasi-informasi yang disediakan oleh lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang tepat itu tidak terjadi,”

“Pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas ini membuat pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal, karena peralatannya juga terbatas. Tentu saya sangat tidak setuju, padahal sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana alam,”

dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas yang mengakibatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal.

“Pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas ini membuat pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal, karena peralatannya juga terbatas. Tentu saya sangat tidak setuju, padahal sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana alam,” kritik Fadli. ■ **tn/sf**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon

Foto: Geraldik



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Pemerintah Wajib Bangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat

Pemerintah Indonesia diminta membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Karena itu, mitigasi bencana perlu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaharui, seperti menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pengadaan alat *early warning system* yang dilengkapi dengan pelatihan mitigasi bencana sehingga kerusakan dan korban dapat diminimalisir.

“DPR mengingatkan pemerintah tentang perlunya pembangunan kesadaran masyarakat atas potensi Indonesia sebagai daerah rawan bencana alam,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan kesimpulan rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1).

Selain itu, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk melakukan percepatan realisasi bantuan bagi korban bencana dengan memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana, melakukan peninjauan kembali terhadap petunjuk teknis terkait dengan hunian.

“Diantaranya mendorong kepastian lokasi satuan bagi seluruh korban bencana, penguatan peran pemerintah daerah sebagai pintu utama dalam penyaluran pelayanan dan bantuan di daerah bencana dengan menampung partisipasi masyarakat dalam dan luar negeri secara luas,” tutur legislator dapi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Fahri melanjutkan, DPR RI juga mengingatkan pemerintah terkait skenario mitigasi berupa sistem pembiayaan dan penanganan bencana dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan dukungan kepemimpinan yang efektif dalam mitigasi dan sosialisasi yang massif sebelum dan sesudah terjadinya bencana. ■ **hs/sf**



Foto: Oj/jk

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL Ketua PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Aranda Prihandini, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske, Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Singgih Rimbani Kinanti, Siti Nadiyah, Rihan Hidayat, Anrimi Puspita Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha, Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Depriisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto, Safitri Restu Widayati, SIP, **INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

Foto: Titara

Kodam Bukit Barisan Siap Kawal Pemilu 2019

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengapresiasi kesiapan Komando Daerah Militer (Kodam) I/ Bukit Barisan (BB) mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.

Meskipun secara umum Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih terbelang aman, namun Kodam I/BB menyatakan selalu bersiap dan waspada terhadap segala situasi yang dapat terjadi.

“Sejalan dengan hal tersebut kami meminta kepada Kodam I/BB untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan sinergitas TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019 di wilayah tugas Kodam I/BB,” ungkap Asril usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam I/BB beserta jajaran di Medan, Sumut, Kamis (17/1).

Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi I DPR RI turut mengapresiasi komitmen Kodam I/BB dalam menjaga netralitas dalam hajatan Pemilu tahun 2019. Hal ini sejalan dengan

Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI.

“Sebagaimana Instruksi Panglima TNI tentang netralitas, prajurit TNI maupun PNS TNI di Kodam I/BB menunjukkan kenetralitasannya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon).

“Netralitas itu harga mati, bahkan Panglima TNI sudah mengeluarkan buku panduan untuk menjadi pedoman seluruh prajurit TNI dimanapun berada.

Untuk itu, kami juga mendorong untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut, agar dilaksanakan secara baik oleh seluruh prajurit Kodam I/BB,” pesan Asril.

Menindaklanjuti terkait pembahasan kebutuhan anggaran dan sarana-prasarana serta kendala yang dihadapi Kodam I/BB dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2019, Asril menuturkan akan membahas lebih lanjut dalam Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

“Kita mengerti untuk mendukung pengamanan itu cukup banyak perangkat dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Tentunya kalau tidak ada dukungan anggaran pastinya sulit, untuk itu kami catat dan rekam untuk selanjutnya disampaikan kepada Panglima TNI untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Kodam I/BB M. Sabrar Fadhilah menuturkan, dalam kebijakan operasional pengamanan dalam Pemilu, Panglima TNI menekankan pentingnya netralitas dan pengamanan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Netralitas itu harga mati, bahkan Panglima TNI sudah mengeluarkan buku panduan untuk menjadi pedoman seluruh prajurit TNI dimanapun berada. Dalam implementasinya seluruh jajaran Kodam sudah mensosialisasikan pemahaman aturan netralitas tersebut, juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap prajurit dan melakukan pengendalian serta pembinaan kepada keluarga besar TNI,” tuturnya.

Sementara terkait pengamanan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dirinya mengatakan Kodam I/BB terus mengikuti indeks kerawanan Pemilu. Untuk indeks kerawanan tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Barat.

“Kami menggunakan pola pengamanan langsung dan tidak langsung. Hal ini juga sudah diatur secara prosedur, baik yang memantau langsung di TPS, mengamankan rute, dan juga mengamankan lokasi-lokasi yang rawan ini semua sudah diidentifikasi oleh masing-masing Kodam,” jelas Sabrar.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI turut diikuti oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI diantaranya Jazuli Juwaini (F-PKS), Meutya Viada Hafid (F-Golkar), Martin Hutabarat, Biem Triani Benjamin (F-Gerindra), Darizal Basir (F-Demokrat), Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), Lena Maryana (F-PPP), Bachtiar Aly (F-NasDem), dan Timbul P. Manurung (F-Hanura). ■ **tra/sf**



Para Kajari Harus Berwibawa di Mata Pemda

Para kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang bertugas di berbagai daerah harus tampil berwibawa di mata aparat pemerintah daerah (pemda).

Ini penting, agar kedekatan kajari dengan kepala daerah tidak menghalangi penegakan hukum. Kecenderungan yang terjadi selama ini, ada kolusi antara Kajari dengan kepala daerah menyangkut kasus hukum di daerah.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi di hadapan rapat kerja dengan Jaksa Agung beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). Menurut Mulyadi, aparat

pemda atau kepala daerah yang sudah merasa nyaman dengan Kajarinya, maka kasus-kasus hukum yang menimpa pemda biasanya tidak ditindaklanjuti.

“Kajari di kabupaten/kota harus berwibawa di mata pemda. Pemda jangan terlalu nyaman dengan Kajari. Jangan sampai kasus atau persoalan hukum menyangkut kepala daerah tidak dilakukan. Kalau sudah terlalu dekat dengan Pemda, biasanya bisa *cincai*. Kajari sekali lagi harus tunjukkan tunjukkan wibawanya di daerah,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ia juga berharap, agar para Anggota DPR RI memonitor perilaku Kajari di dapilnya masing-masing. Hukum tidak boleh timpang, sambung Mulyadi, baik terhadap perorangan maupun kelompok.



Foto: Geraldi/ik

Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi

“Ini penting supaya tidak ada salah persepsi di mata masyarakat. Penegakan hukum harus equal dan kepemimpinannya juga harus ditingkatkan.” imbuhnya. ■ mh/sf

Aplikasi SmartPTSL Percepat Pemetaan Tanah

Aplikasi SmartPTSL yang saat ini dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diyakini dapat mempercepat proses pemetaan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebelum pemetaan di wilayah Provinsi Banten ditargetkan selesai pada tahun 2025, bukan tidak mungkin dengan adanya aplikasi ini, proses pemetaan dapat diselesaikan antara tahun 2021 hingga 2023.

“Menurut saya, ini merupakan suatu ide dan gagasan yang bagus. Dan ini membuat proses PTSL dapat direduksi waktu dan usahanya. Kalau ini sudah sukses, bisa direplikasi ke daerah-daerah yang lain,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan Bupati Tangerang, di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/1).

Yang membuat legislator dapil Jawa Barat VII itu tertarik pada aplikasi ini adalah kemampuan untuk membantu masyarakat dalam mempercepat proses pendaftaran tanah yang dimilikinya. Dengan aplikasi SmartPTSL, kerangka peta tanah masyarakat sudah dapat diketahui, tinggal perlu sedikit proses pematangan di lapangan saat pengukuran tanah.



Foto: Eman/ik

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

SmartPTSL merupakan aplikasi pengumpulan data fisik dan yuridis yang berbasis Geografi Information System (GIS) yang dioperasionalkan menggunakan *smartphone* dengan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan PTSL. Hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu memberikan suatu kemudahan untuk membantu percepatan penyelesaian

pekerjaan PTSL sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menjelaskan kesuksesan program PTSL bukanlah berkat kerja keras Kementerian ATR/BPN semata, melainkan berkat partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. “Di Kementerian ATR/BPN itu cuma anggarannya saja, kalau menyukseskan program ini ya dari partisipasi aktif masyarakat itu sendiri,” jelas Abeng.

Target awal untuk tahun 2018 kemarin, kata Abeng, pengukuran program PTSL untuk Provinsi Banten yaitu sebanyak 400 ribu bidang. Kemudian dapat dioptimalisasi sehingga terjadi penambahan hingga 463 bidang pengukuran. Dari angka tersebut, sebanyak 442 ribu bidang sudah selesai oleh petugas PTSL.

Terkait pemanfaatan aplikasi SmartPTSL, ditambahkan Abeng pihak Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) turut terlibat langsung dalam sosialisasi penggunaan aplikasi SmartPTSL kepada karang taruna di tingkat desa. Ia juga meminta kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk juga turut mensosialisasikan pentingnya program PTSL ini.

Kunspek Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria (F-PKS), dan sejumlah Anggota Komisi II diantaranya Eddy Kusuma Wijaya dan Tuti N Roosdiono (F-PDI Perjuangan), Muhammad Afzal Mahfuz (F-Demokrat), Yandri Susanto (F-PAN), Yanuar Prihatin (F-PKB), Chairul Anwar (F-PKS) serta Beni Sudrajat (F-NasDem). ■ es/sf

Komisi II DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto telah memberikan solusi terkait pertanahan dan kependudukan. Selain itu, Komisi II juga memberikan sanjungan kepada Bupati Gresik yang telah memimpin pembangunan di Gresik secara progresif.

“Bupati menyebutkan ada istilah ‘Kakeku Datang’ atau Kartu Keluarga Data Ulang. Ini menjadi kunci, apalagi KTP-Elektronik menjadi satu kartu yang wajib dimiliki Warga Negara Indonesia. Dan orang tidak bisa memiliki e-KTP kalau tidak memiliki Kartu Keluarga,” jelas Ninik, sapaan akrab Nihayatul usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan Bupati Gresik di Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/1).

Menurut Ninik, salah satu alasan mengunjungi Kabupaten Gresik adalah, melihat Gresik memiliki potensi perkembangan yang luar biasa. Ia mengatakan, dulu antara Surabaya dan Gresik jarak

Komisi II Apresiasi Pelayanan Publik Gresik



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh bertukar cenderamata dengan Bupati Gresik

tempuhnya sangat jauh, namun sekarang dengan adanya jalan tol jadi lebih dekat. “Selain itu, kita melihat Gresik sebagai daerah industri. Kita tidak mau investasi yang turun di Kabupaten Gresik ini akan terhambat persoalan perizinan,” imbuh legislator PKB itu. Di bidang Industri, Ninik menilai inovasi

yang dikeluarkan Bupati Gresik cukup menjadikan pembangunan lancar dan progresif. “Luar biasa sekali Bupati inovasinya, tentang perizinan yang diterapkan di daerah industri. Perizinan biasanya luas tanahnya dulu baru lokasinya, tapi Bupati sudah menegaskan, kita harus lihat dulu tanahnya dimana, baru izin

Komisi IV Bangga Atas Capaian PT. Salmah Arowana Lestari

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengaku bangga atas capaian yang diperoleh PT. Salmah Arowana Lestari dalam melestarikan dan membudidayakan ikan arwana, sehingga mampu menggenjot perekonomian di Kota Pekanbaru. Dalam sebulan, hasil penjualan ikan arwana bisa mencapai Rp 1 miliar.

“Saya merasa bangga. PT. Salmah ini berdiri dari tahun 1987 dan terus eksis hingga bisa memberikan devisa negara. Ekspor ke sejumlah negara itu bisa 2000 ekor dengan nilai sampai Rp 1 miliar. Itu per bulan,” ujar Daniel Johan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau lokasi penangkaran ikan arwana milik PT. Salmah Arowana Lestari di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (18/1).

Daniel terus mendukung langkah PT. Salmah Arowana Lestari untuk meningkatkan produksi ikan arwana, karena ini bagian dari kekayaan sumber daya hayati dan patut dilestarikan. Ia juga apresiasi atas kebijakan PT. Salmah dalam merekrut pekerja yang mayoritas adalah pekerja lokal. Sehingga keompakan ini membuahkan hasil dengan banyaknya jumlah ikan yang diekspor ke luar negeri. “Keberhasilan budi daya ikan ini bisa diekspor.

Sejauh ini yang dilakukan dalam konteks melibatkan masyarakat yakni memasok pakan. Ke depannya nanti kita mulai melibatkan untuk membudidaya yang lain,” tutur legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Salah satu ciri khas ikan arwana yang dibudidayakan oleh PT. Salmah yakni Golden Banjar. Identitas ini penting untuk merawat komoditas yang sudah diekspor ke banyak negara ini. “Kita bersyukur PT. Salmah ambil bagian dalam melestarikan dan memperkenalkan kepada dunia. Ini bagian dari meningkatkan devisa bagi negara juga,” tutup Daniel.

Turut serta dalam Kunspek ini sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, diantaranya Hermanto, Effendy Sianipar, Asep Ahmad Moushul Affandy dan Muchtar Luthfi A Mutty. Sejumlah mitra kerja juga turut hadir, yakni Dirjen Konservasi Sumber



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau lokasi pe...

lokasinya kita tentukan. Saya pikir ini menjadi inovasi yang luar biasa di Gresik,” ungkapnya.

Selain itu, Ninik juga memberikan perhatian serius terkait pelayanan publik di Pulau Bawean yang masuk wilayah Gresik. “Gresik ini wilayahnya bukan hanya daratan, tapi juga wilayah kepulauan. Kita tidak ingin ada diskriminasi pelayanan, baik di kepulauan atau yang di daratan. Oleh sebab itu, saya konsen apakah ada komplain dari masyarakat di kepulauan. Alhamdulillah, komplain yang masuk ke Ombudsman hanya masalah listrik, dan itu sudah beberapa tahun yang lalu, sehingga sudah terselesaikan,” papar legislator dapil Jatim itu.

Tim Kunspek Komisi II DPR RI juga mempertanyakan kebijakan dan program pelayanan publik yang telah dilakukan Pemkab Gresik dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Menjawab pertanyaan tersebut, Bupati Gresik menjawab, pemenuhan pelayanan di Gresik merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission* (OSS).

Contohnya seperti pelayanan terintegrasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. ■ **eko/sf**

Daya Alam dan Ekosistem Wiratno dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Suharyono, serta jajaran terkait. ■ **hs/sf**



Foto: Hendra/jk

nangkaran ikan arwana PT. Salmah Arowana Lestari di Pekanbaru

Komisi I Apresiasi Kesiapan Kodam Hasanuddin Kawal Pemilu

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi skema pengamanan yang telah disiapkan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin dalam rangka mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang.

Ia menegaskan, saat ini Kodam XIV/Hasanuddin sudah dalam kondisi yang prima untuk membantu mengawal Pemilu yang terdiri dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) itu.

Hal ini disampaikan Andreas ketika mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin beserta jajaran di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (17/1). Menurutnya, Sulsel merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan politik cukup tinggi dan dalam masa transisi, sehingga tingkat kerawanan cukup tinggi di daerah tersebut.

“Saya kira kita semua sudah mengerti, kalau kita lihat tren yang selama ini terjadi dan tingginya indeks kerawanan politik yang ada di daerah, termasuk Sulawesi Selatan ini. Mungkin ini yang harus kita lakukan dengan benar, bagaimana kita melihat dan mengantisipasi bahwa seringkali terjadi suatu kekacauan. Ini akan menjadi *trigger* untuk ke depannya agar tidak tercipta eskalasi yang sifatnya lebih besar,” tutur Andreas.

Dengan melihat skema persiapan

“Netralitas itu harga mati, bahkan Panglima TNI sudah mengeluarkan buku panduan untuk menjadi pedoman seluruh prajurit TNI dimanapun berada.



Foto: Erlangga/jk

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira

yang sudah dipaparkan dalam rapat, legislator PDI-Perjuangan ini mengimbau agar potensi kekacauan yang akan terjadi nanti, walaupun dalam skala terkecil untuk dapat diantisipasi. Karena menurutnya, potensi kekacauan kecil sekalipun apabila tidak diatasi akan berimbas fatal untuk demokrasi Indonesia ke depannya, seperti yang sudah seringkali terjadi sebelumnya.

“Ini yang harus kita benar-benar hindari. Oleh karena itu, saya kira apa yang bapak-bapak lakukan di Sulsel ini tentu sangat penting untuk tidak menjadi salah satu titik api dan terjadi eskalasi kekacauan. Karena itu, saya kira ini harus dilakukan karena di Sulsel ini telah menjadi tanggung jawab bapak-bapak sekalian,” pesan politisi dapil Nusa Tenggara Timur I ini kepada seluruh jajaran Kodam XIV/Hasanuddin. ■ **eps/sf**

Komisi II Minta Pemkab Indramayu Dukung Program PTSL

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digalakkan pemerintah. Menurutnya, dukungan dari pemkab sangat diperlukan bagi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu agar bisa berjalan dengan baik.



Foto: Genaldi/ik

Tim Kunspek Komisi II DPR RI memantau implementasi program PTSL di Kabupaten Indramayu

Demikian disampaikan Herman di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, baru-baru ini. Tim Kunspek Komisi II DPR RI pun menggelar pertemuan dengan Plt. Bupati Indramayu H. Supendi dan Kepala BPN Kabupaten Indramayu Herryzal Sjafriz beserta jajaran di Kantor BPN Indramayu.

“Jumlah manusia akan terus meningkat, pada sisi lain tanahnya tetap. Sehingga tanah akan menjadi suatu yang strategis di masa yang akan datang. Saya katakan bahwa badan pertanahan di dunia manapun, pasti melihat pertanahan itu memegang peranan yang sangat penting

dalam kehidupan berbangsa dan menjadi hajat hidup rakyatnya. Sehingga faktor utama yang harus di kedepankan adalah tanah harus didaftarkan,” jelas Herman.

“Masalahnya bukan hanya kepada keterbatasan sarana, bahkan ruang untuk menyimpan dokumentasi dan arsip itu tidak memadai, sehingga ke depan akan dikembangkan dengan sistem digital, jadi bisa lebih simple.”

Dari pertemuan terungkap, persentase pelaksanaan PTSL di Indramayu baru sekitar 18,7 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia rata-rata sudah 30 persen. Artinya untuk implementasi program PTSL di Indramayu masih di bawah rata-rata nasional. Menurut legislator Partai Demokrat itu, secara bertahap pendaftaran ini diselesaikan dan menjadi dasar kepemilikan atas hak seseorang akan tanahnya di seluruh wilayah Indramayu.

“Masalahnya bukan hanya kepada keterbatasan sarana, bahkan ruang untuk menyimpan dokumentasi dan arsip itu tidak memadai, sehingga ke depan akan dikembangkan dengan sistem digital, jadi bisa lebih simple. Bahkan kalau di luar negeri, sertifikat itu cukup satu lembar, dan di Indonesia juga bisa satu lembar. Mungkin sekali waktu akan berbentuk seperti ATM. Untuk itu, kami ingin lihat sejauh mana perkembangan ini,” tandas legislator dapil Jawa Barat ini.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama di Indramayu, Tim Kunspek Komisi II DPR RI juga menggelar pertemuan dengan KPUD Indramayu guna memantau persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indramayu. Berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indramayu yang berjalan dengan baik, Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono yakin Pemilu serentak yang digelar di Indramayu pada 17 April 2019 mendatang juga akan berjalan lancar. Kendati masih ada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indramayu, legislator PKS ini yakin hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.

“Masyarakat Kabupaten Indramayu masih memiliki beberapa kendala, yaitu terkait hak pilih, tapi hal tersebut akan terus menjadi pantauan pemerintah. Kita sebenarnya ingin urusan Pemilu terutama hak pilih ini berbasis pada KTP-Elektronik. Tapi ini memang ada kendala, makanya sampai sekarang kita pantau dan sampai sekarang pun masih ada orang yang belum punya KTP-Elektronik, sehingga menggunakan surat keterangan (suket). Tapi harapan kita ini bisa menyelesaikan terkait dengan hak rakyat sebagai pemilih pada Pemilu,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu. ■ **opi/sf**



Foto: Tasya/ik

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meninjau fasilitas pendidikan Politeknik KP Sidoarjo

Komisi IV Dorong Siswa Politeknik KP Sidoarjo Kembangkan Inovasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mendorong agar Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Sidoarjo yang dibina oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus mengembangkan inovasi baru dalam hal budi daya dan pengolahan ikan. Sehingga, seluruh inovasi yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan dapat dikembangkan oleh Politeknik KP Sidoarjo.

“Kami menginginkan inovasi-inovasi itu dalam hal pengolahan, produk-produk hasil pengolahan ikan kemudian budi daya dan juga untuk pakan dan penyakit,” kata Viva Yoga memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/1). Turut hadir, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, Komisi IV DPR RI akan mendukung sepenuhnya pembangunan

sekolah, baik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun Politeknik di sentra-sentra perikanan. Hal ini dinilai menjadi salah satu langkah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan yang tidak hanya menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian, tetapi juga *way of life*.

“Jadi dengan pengembangan edukasi yang baik, ilmu pengetahuan yang cukup, dan inovasi-inovasi yang sangat *compatible* dengan dunia global, saya rasa pengembangan dunia maritim, kelautan dan perikanan di Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Apalagi misi pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat dijawab dengan pengembangan ilmu pengetahuan

Misi pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat dijawab dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

dan teknologi (iptek),” terang Viva Yoga.

Tak hanya itu, Komisi IV DPR RI pun turut menyoroti fasilitas di Politeknik KP Sidoarjo. Menurut Viva Yoga, Politeknik KP Sidoarjo masih memerlukan alat-alat baru yang lebih modern. Sehingga dapat menunjang para siswa dalam belajar membuat siswa tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan dunia khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan, tetapi membuat siswa mampu bersaing dengan industri nasional, bahkan internasional.

“Kami Komisi IV DPR akan menyampaikan kepada pemerintah untuk menambah anggaran dalam pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan, agar siswa dapat dengan mudah dan cepat saat mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat,” dorong Viva Yoga.

Secara kumulatif, legislatif daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini menilai para siswa di Politeknik KP Sidoarjo memiliki dasar yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan industri 4.0. Untuk itu, ia berharap agar para siswa dapat serius, telaten, dan fokus dalam mengembangkan iptek dan inovasi baru.

■ nap/sf

Kotawaringin Barat Butuh Perbaikan Infrastruktur

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mengandalkan sektor kelapa sawit dan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga, daerah ini sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai menuju pelabuhan peti kemas ataupun ke tempat wisatanya.



Foto: Ryan/Jk

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo Kallteng

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menuturkan, jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo di Kotawaringin Barat masih berstatus jalan kabupaten dan kondisinya rusak berat, sehingga harus segera dibangun untuk memperlancar transportasi.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau perencanaan pembangunan jalan nasional menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (17/1).

“Saat ini kita lihat kondisinya rusak berat, karena statusnya masih jalan kabupaten. Kami dari Komisi V menyarankan agar status jalan tersebut bisa diubah menjadi jalan nasional, supaya dalam proses pembangunan jalan tersebut bisa menggunakan dana dari APBN,” kata Ibnu.

Legislator Partai Golkar tersebut berharap, dengan dibangunnya jalan menuju tempat-tempat strategis, seperti ke pelabuhan dan tempat wisata, berdampak naiknya pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotawaringin Barat, sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dapil Kalimantan Tengah, Agati Sulie Mahyudin menuturkan, perubahan jalan kabupaten menuju jalan nasional harus segera dilakukan untuk memperlancar arus ekonomi di Kotawaringin Barat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah, dalam hal ini sektor perbankan dalam negeri untuk meninjau ulang besaran (plafon) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk pelaku industri kecil menengah atau industri rumahan.

Pasalnya, harga bahan baku di pasaran semakin meningkat, namun bantuan KUR tanpa agunan dibatasi sebesar Rp 20-25 juta.

“Kami meninjau langsung beberapa pelaku industri industri rumahan yang selama ini mendapatkan KUR sebagai modal usahanya. Mereka mengaku tidak ada kendala dalam permintaan maupun pencairan KUR. Tapi mereka meminta agar plafonnya diperbesar. Dengan kata lain mereka bisa mendapatkan KUR dengan jumlah lebih besar lagi,” jelas Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI meninjau usaha pembuatan batu bata di Deli Serdang, Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Senin (21/1).

Dilanjutkannya, selama ini untuk bantuan KUR tanpa

Evaluasi Ulang Besaran KUR Bagi Industri Rumahan



Foto: Ayu/Jk

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau pembuatan usaha tempe di Sumatera Utara

“Setelah meninjau beberapa sektor infrastruktur, saya melihat jalan yang memprihatinkan kondisinya. Kita berharap setelah kunjungan ini akan ada bantuan untuk perbaikan jalan ataupun mengubah status jalan dari jalan kabupaten, berubah menjadi jalan nasional,” harap Agati.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menilai, pembangunan jalan yang berdampak untuk memperlancar arus ekonomi harus segera dilakukan. Namun ketika jalan tersebut sudah dibangun, harus ada pengawasan yang ketat untuk setiap kendaraan yang lewat, khususnya bagi kendaraan berat.

“Kotawaringin Barat ini kan mengandalkan sektor sawit untuk pendapatan daerahnya. Ketika jalan sudah dibangun, harus ada jembatan timbang sebagai bentuk pengawasan. Jangan sampai truk pengangkut sawit asal lewat dengan muatan yang melebihi beban jalan dan akibatnya jalannya rusak lagi, dan jembatan timbang juga benar-benar harus berfungsi sebagai mana mestinya, bukan malah menjadi tempat pungli,” tutur legislator Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah berharap dengan dibangunnya jalan nasional bisa menaikkan pendapatan daerah. “Dengan dibangunnya jalan nasional menuju pelabuhan peti kemas dan tempat wisata menuju Tanjung Puting, akan menaikkan pendapatan daerah, karena infrastruktur jalan semakin baik dan lancar,” tutur Nurhidayah. ■ rh/sf

agunan memang dibatasi dengan nominal Rp 20-25 juta, sementara KUR dengan agunan bisa lebih dari itu. Namun dengan harga bahan baku di pasaran yang juga meningkat, maka permintaan tambahan KUR sebagai modal pengembangan usaha menjadi suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap agar pemerintah dan perbankan meninjau ulang besaran plafon KUR.

Hal tersebut juga diamini oleh semua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI yang hadir di Sumut, seperti Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Marsiaman Saragih, Doni Priambodo, Siti Mufattahah, Didik Irawadi, Andi Achmad Dara, dan Erik Adtrada Ritonga. ■ ayu/sf

Komisi IV Apresiasi Serapan Anggaran Kementan Tahun 2018

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi anggaran kementerian yang dipimpin Menteri Amran Sulaiman itu tahun 2018 sebesar 90,83 persen atau Rp 21, 8 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 24,4 triliun.

Untuk tahun 2019, Komisi IV DPR RI masih mendengar sejumlah rencana program yang akan dilakukan Kementan. Diharapkan pembangunan tahun 2019 tetap fokus dalam pemerataan untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

“Selanjutnya dalam mendukung rencana kerja 2019 tetap fokus membangun pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas melalui pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman,” tutur Edhy saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Diketahui, sejumlah kinerja

Pengurangan luas lahan pertanian akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian. Sehingga di tahun 2019 ini perlu menjadi catatan untuk dijadikan perbaikan.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

Kementan yang telah dilakukan di tahun 2018 adalah berupa pengembangan padi, jagung, bawang merah, karet, pala hingga perbaikan irigasi sumber air. Tak hanya itu, penumbuhan wirausaha muda pertanian juga dilakukan Kementan.

Dalam kesempatan ini, Edhy menyoroti kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi. Diantaranya Kalimantan Selatan dari 452.349 hektar menjadi 252.972 hektar pada 2018, kemudian Sumatera Utara dari 429.178 hektar menjadi 245.801 hektar dan Sumatera Selatan dari 537.333 hektar menjadi 387.237 hektar.

Menurut Edhy, pengurangan luas lahan pertanian akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian. Sehingga di tahun 2019 ini perlu menjadi catatan untuk dijadikan perbaikan. Selain dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, turut serta Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadiah Permana. ■ hs/sf

Pengelolaan Lingkungan Indocement Cirebon Harus Sesuai Regulasi



Foto: Enof/k

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau pengelolaan limbah PT. Indocement Tunggul Prakarsa Cirebon

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan, pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Cirebon harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nasir pun memastikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawasi pengelolaan

lingkungan yang dilakukan perusahaan dengan luas area 346 hektar itu. Apabila terbukti terdapat beberapa hal yang melanggar peraturan, maka Komisi VII

DPR RI meminta KLHK, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk memproses secara hukum.

“Kita sudah ambil beberapa sampel. Soal hak dan kewajibannya kita serahkan kepada KLHK. Dari Dirjen Gakkum juga akan meninjau langsung lokasi yang kita tinjau ini. Kita berikan kesempatan kepada kementerian untuk menindaklanjuti hal itu secepatnya,” ujar Nasir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI meninjau pengelolaan limbah di PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Cirebon, Jawa Barat (23/1).

Legislator Partai Demokrat ini menambahkan, dalam hal ini indikator tolak ukurnya apakah angka pencemaran tersebut masih sesuai regulasi UU atau tidak. KLHK diharapkan segera memberikan laporan kepada Komisi VII DPR RI secepatnya, agar bisa segera dibahas dalam rapat kerja. Apabila terbukti menyalahi aturan, maka akan diberikan sanksi kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa Cirebon. ■ eno/sf

Pimpinan Komisi IX Tak Puas dengan Laporan DAK Setjen Kemenkes

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai laporan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tidak mendetail, bahkan ada anggaran yang tumpang tindih. Lebih tegas lagi bahkan ia mengusulkan agar rapat tentang evaluasi ini diulangi.

“Kita mau mengevaluasi dua tahun, tapi yang diberikan kepada kita hanya beberapa lembar, ini saya serius sekali pak. Saya mau mengatakan bahwa apa yang ditampilkan ini sebetulnya tidak berbobot. Saya minta supaya rapat ini diulangi lagi. Kenapa, karena saya tidak mendapat informasi apa-apa tentang evaluasi yang kita lakukan ini,” tandas Saleh saat RDP dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Legislator PAN ini merasa tidak



Foto: Andri/k

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Rencananya akan dibangun drainase di Kota Kupang, guna mengantisipasi dan mengurangi banjir, karena ke depannya Kota Kupang akan lebih berkembang. Sehingga pembangunan infrastrukturnya harus segera dimulai dari sekarang.

Hal tersebut diungkapkan Fary saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI dengan Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi dan Wali Kota Kupang Jefirstson Riwu Kore dan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, Jumat (18/1).

“Selain itu, akan dibangun rencana tata ruang Kota Kupang, diperindah dan lebih memperbanyak ruang hijau agar memperbaiki ruang citra Kota Kupang di mata nasional. Selama ini, Kota Kupang mendapat julukan kota terkotor di Indonesia,” kata Fary yang juga putera asli daerah NTT.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi mengatakan, NTT dipandang sebagai daerah dengan rentang kemiskinan tinggi, karena salah satu faktornya adalah pengaruh minimnya infrastruktur, sarana maupun prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tim Kunspek Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan beberapa sektor untuk dibangun.

Wali Kota Kupang Jefirstson Riwu Kore mengatakan, dirinya berterimakasih kepada Komisi V DPR RI yang sudah memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai

puas dengan laporan yang disajikan oleh Sekjen Kemenkes. Ia pun memberikan contoh, “Laporan per Dirjen tidak ada di sini, Yankes itu DAK-nya berapa, P2P menggunakan DAK berapa, alkes kalau memakai obat-obatan berapa, tidak jelas. Di-kasih umum saja, kalau umum seperti ini di mana-mana kita bisa peroleh informasinya,” ungkapnya.

Menurutnya laporan kepada DPR RI, semestinya lebih spesifik, lebih khusus, terlebih lagi yang dibahas Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, ia mengusulkan agar rapat diulangi lagi, agar Komisi IX DPR RI mendapat penjelasan yang lebih mendetail. Karena dalam DAK Kesehatan, ada anggaran yang perlu dilaporkan secara jelas.

“Jangan sampai ada anggaran yang melenceng, digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Karena bapak kasih 10 lembar

Komisi V Pantau Infrastruktur NTT

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan, Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu kota yang mendapat perhatian khusus untuk penyelesaian beragam persoalan pembangunan sarana prasarana maupun infrastruktur.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur NTT

bentuk dan upaya kerja keras serta peduli terhadap NTT, khususnya Kota Kupang.

Usai pertemuan, Tim Kunspek Komisi V DPR RI melanjutkan kunjungan

ke Pelabuhan Pelni, ASDP, drainase di Kota Kupang, serta memantau pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta pembangunan Jalan Kolbano. ■ hr/sf

begini, masa Kementerian Kesehatan, DAK-nya saja kata Bu Ermalena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, RED) 26 koma sekian triliun laporannya cuma begini,” keluh Saleh.

Legislator dapil Sumatera Utara itu pun menemukan ada tumpang tindih anggaran antara Kemenkes yang dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), karena keduanya sama-sama menganggarkan dana untuk program keluarga berencana

“Jangan sampai ada anggaran yang melenceng, digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Karena bapak kasih 10 lembar begini, masa Kementerian Kesehatan, DAK-nya

dan kesehatan reproduksi.

“Menurut saya, yang agak tumpang tindih di sini adalah, ada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sementara ada anggaran di BKKBN tahun 2018 anggarannya Rp 5,54 triliun, itu hanya khusus soal KB dan kesehatan reproduksi. Tahun 2019 mereka punya anggaran Rp 3,79 triliun itu juga hanya untuk KB saja,” ungkap Saleh.

Ia melanjutkan, “Sementara di Kementerian Kesehatan muncul lagi arah kebijakan itu. Bagi saya ini persoalan penggunaan anggaran negara bolak-balik tumpang-tindih sana-sini tanpa kita mengerti. Mana yang menjadi proporsi Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi proporsi BKKBN. Mana yang sudah dikerjakan, dan akan dikerjakan Kementerian Kesehatan, mana yang sudah dan akan dikerjakan BKKBN,” beber Saleh.

■ eko/sf

Akses Jalan Pelabuhan Ahmad Yani Kurang Memadai

Akses jalur jalan, baik yang akan masuk maupun keluar dari Pelabuhan Ahmad Yani di Kota Ternate, Maluku Utara dirasa masih belum teratur dan memadai. Suasana kepadatan kerap terjadi akibat kurang luasnya lahan yang ada, sehingga orang yang hendak menuju ke dalam pelabuhan dengan yang akan keluar di pelabuhan itu harus melewati jalur yang sama.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno yang juga selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V ke

Provinsi Maluku Utara mengatakan bahwa langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembebasan lahan oleh pihak pemerintah daerah.

“Kita mendorong kepada Walikota, Bupati dan Gubernur agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Sebab untuk masalah akses jalan tersebut, kembali kepada Pemda-nya. Pemerintah pusat hanya membiayai untuk membangun, tetapi tidak dalam hal pembebasan lahan,” ucap Anton di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI di Ternate, Malut, Kamis (17/1).

Ditegaskan legislator Partai Demokrat ini, Komisi V DPR RI akan meminta kepada pihak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar dapat menyediakan lahan yang



Foto: Dep/ik

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno meninjau Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara

dibutuhkan tersebut.

Mengenai persoalan-persoalan lain yang juga dihadapi oleh mitra kerja Komisi V DPR RI lainnya di Provinsi Maluku Utara, Anton menyatakan akan meneruskan semua masukan informasi yang diterimanya kepada pemerintah pusat. “Kita akan membahasnya dalam rapat dengan pihak Kementerian terkait dan diharapkan ada solusi yang bisa dihasilkan,” tandasnya.

Dalam kunjungan ke Provinsi Maluku Utara tersebut, Tim Kunspek Komisi V DPR RI berkesempatan meninjau secara langsung Pelabuhan Laut Ahmad Yani, Pelabuhan Penyeberangan Bastiong, pemukiman kumuh Dufa-Dufa, serta melihat kondisi jalan nasional Maluku Utara di Kota Ternate. ■ **dep/sf**



Foto: Azka/jk

Pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. NHM di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara

Komisi VII Dorong PT. NHM Capai Proper Hijau

Wakil ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membina langsung PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, agar meningkatkan status Program Penilaian Peringkat (Proper) menjadi hijau.

Saat ini, PT. NHM mendapat Proper dengan nilai biru dalam hal lingkungan, yang artinya sudah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan lingkungan. Ridwan memastikan, jika nantinya status Proper sudah menjadi hijau, PT. NHM bisa menjadi contoh perusahaan tambang mineral di bidang lingkungan.

“PT. NHM jika status Propernya sudah naik menjadi hijau, ini bisa menjadi contoh untuk semua perusahaan-perusahaan tambang mineral. Seharusnya memang perusahaan tambang dan mineral nilai Propernya harus hijau dari segi lingkungan,” kata Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengunjungi PT. NHM di Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa (22/1).

Selain itu, legislator Partai Golkar itu mengatakan bahwa PT. NHM sudah kontrak karya (KK) dari tahun 1997, sebelum rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan dan diberlakukan, tetapi sudah ada perpanjangan dan sekarang sudah KK generasi keenam yang berlaku sampai 2020.

“Untuk saat ini hanya kontrak karya sampai 2020, salah satu yang harus dipenuhi ialah melepas saham,

dimana 51 persen merupakan saham untuk perusahaan BUMN, BUMD, atau perusahaan nasional Indonesia, dalam hal ini Antam memiliki 25 persen. Masih ada 26 persen lagi yang harus dilepas agar menjadi lebih bagus lagi,” jelasnya.

Ridwan juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan juga Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memiliki badan usaha di bidang tambang dan juga perusahaan milik BUMD dari Kabupaten Halmahera Utara, agar nantinya bisa mengambil bagian dari pertambangan untuk pemerintah.

“Pemerintah daerah dan provinsi agar segera membuat badan usaha itu, karena saat ini sudah tidak ada lagi istilah minta sumbangan tidak jelas. Semuanya harus berbentuk badan usaha karena saat ini sudah *business to business*, jadi semuanya dikelola oleh badan usaha yang profesional dibidangnya, agar semuanya transparan. Pemerintah hanya untuk membuat regulasinya saja,” papar Ridwan.

Politisi dapil Jawa Timur V ini mengatakan, jika berjalan dengan baik maka masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara maupun Maluku Utara akan mendapatkan manfaat hasil yang jelas dari saham tersebut dan ada *dividen* yang bisa mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

■ **azk/sf**



“ Jumlah penduduk Kabupaten Bogor lebih dari 5,8 juta dan termasuk wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia. Cuma barangkali perlu kita pikirkan tingkat pendidikan dari pada warga di Kabupaten Bogor,” kata Djoko di Pendopo Kabupaten Bogor, Selasa (22/1).

Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Bogor menjadi dasar rencana pembangunan universitas baru sehingga nanti masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan lebih mudah. Politisi Demokrat ini juga berjanji akan membantu proses perizinan pembangunan universitas baru itu hingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

“Karena ini wilayahnya cukup luas dan penduduknya sangat luar biasa. Dan tidak ada universitasnya. Makanya mudah-mudahan nanti kalau sudah perizinannya sudah ada saya akan bantu untuk segera menyelesaikan perizinan Kementerian ristekdikti,” katanya.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Komisi X DPR RI, Bupati Bogor Ade Yasin meminta bantuan untuk rehab bangunan sekolah yang rusak dan dibangunnya kampus di wilayah Bogor Timur dan klinik patah tulang Cimande yang merupakan terusan dari padepokan silat Cimande.

Ade Yasin menjelaskan, karena faktor administrasi yang lebih mudah dan peluang lowongan pekerjaan yang lebih besar, ia menyarankan kampus tersebut jenisnya politeknik.

“Pengurusan politeknik itu lebih mudah kepengurusan izinnya, selain itu lulusan politeknik lebih mudah mendapatkan pekerjaan hingga kami optimis bisa membantu mengurangi angka pengangguran yang mencapai 230 ribuan jiwa,” terangnya.

Komisi X Dukung Pembangunan Universitas di Kabupaten Bogor

Komisi X DPR RI mendukung pembangunan universitas di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.



Foto: Suci/jk
Tim Kunspek Komisi X DPR RI bertukar cenderamata dengan Bupati Bogor

Ade Yasin menjelaskan, permintaan dibangunnya kampus di wilayah timur Bogor ini agar angka rata-rata lama sekolah di sana meningkat. “Kalau anak-anak Bogor Timur ini harus kuliah ke IPB Dramaga dan kampus lainnya di luar daerah, biaya hidupnya besar. Jika ada kampus di sini, bisa meringankan biaya kuliah yang dikeluarkan oleh orang tua,” jelasnya.

Di bidang kebudayaan, ia mempromosikan objek wisata perguruan silat Cimande yang berada di Kecamatan Caringin kepada Tim Komisi X DPR RI. “Perguruan silat Cimande dan klinik pengobatan patah tulang ini akan kami jadikan objek wisata budaya dan kesehatan, kami optimis objek wisata ini akan maju karena silat Cimande ini sudah terkenal di mancanegara,” tambahnya. ■ sc



Foto: Chasbi/jk

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

Sarpras Seniman Depok Perlu Diperhatikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bertemu dengan Wali Kota Depok beserta jajarannya guna menyerap aspirasi dan masukan terkait pendidikan dan kebudayaan. Dari hasil pertemuan, terungkap bahwa sarana dan prasarana seniman dan budayawan Depok perlu mendapat perhatian.

“ Ketika kami datang ke Depok ternyata kami mendapat masukan yang jauh lebih banyak, seniman dan budayawan yang sering tampil di televisi dan media elektronik di Jakarta kenyataannya mereka tinggal di Depok jadi wajar sarana dan prasarana mereka juga harus dipenuhi,” kata Fikri di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (22/01).

Politisi PKS ini menambahkan, Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta, sehingga perlu mendapat perhatian yang proporsional. Menurutnya, dengan sarpras yang memadai, ketika para seniman dan budayawan

Komisi X Apresiasi Konsistensi Kampung Kranggan Jaga Adat dan Budaya

Kampung Kranggan di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi hingga kini tetap konsisten dalam menjaga tradisi, adat dan budaya leluhur yang telah ada sejak abad 15. Bahkan setiap tahunnya digelar berbagai kegiatan, salah satunya Babaritan, guna melestarikan warisan leluhur.

Kampung Kranggan pun telah ditetapkan Wali Kota Bekasi sebagai cagar budaya Kota Bekasi. Konsistensi Kampung Kranggan menjaga adat dan budaya ini diapresiasi Komisi X DPR RI.

“Kami terkejut, ternyata tak jauh dari Ibu Kota Jakarta kita bisa menyaksikan satu daerah yang betul-betul konsisten mempertahankan adat budaya. Ini menurut saya bisa menjadi contoh, menjadi daerah yang siap menerima siapapun yang ingin hadir untuk bertukar gagasan dan ide tentang kebudayaan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Kampung Kranggan, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/1).

Legislator Partai Golkar itu melanjutkan, kehadiran Kampung Kranggan ini yang tak jauh dari pusat ibu kota, memudahkan akses bagi siapapun untuk mempelajari adat istiadat masyarakat Kranggan. Berbagai ritual dan tradisi budaya yang selama ini

akan berekspres atau melakukan hal pengembangan dalam dirinya, bisa dilakukan di Depok, sehingga tidak jauh ke Jakarta.

“Di Depok perlu ada sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekspresi dan bakat mereka, ke depannya ini bisa regenerasi. Kesadaran untuk memajukan kebudayaan bukan menjadi beban, tapi ini adalah investasi besar yang juga berdampak pada ekonomi kreatif yang saat ini sedang disusun regulasinya,” jelas Fikri.

Dalam Kunspek Komisi X DPR RI ke Depok ini turut didampingi oleh salah satu mitra kerja, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertugas mencatat, mendengar dan menindaklanjuti hasil pertemuan pada ini.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI disambut tarian selamat datang dari warga Kampung Kranggan

Foto: Suci/jk

dijalankan masyarakat Kranggan bukan hanya bisa dipelajari oleh daerah lain, namun juga dikembangkan lagi ke depannya. Menurutnya, DPR RI pun telah mengakomodir kebudayaan ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Kampung Kranggan ini bukan hanya memiliki potensi wisata, tapi membangun seni budaya lokal, ekonomi kreatif, dan lainnya. Mereka juga terlibat dalam kongres kebudayaan nasional, dan sekarang sedang aktif memikirkan kampung ini akan lebih maju di masa mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terwujud dengan adanya kerja sama tokoh adat, pemikir, lurah, camat, DPRD dan DPR RI. Insha Allah Kota Bekasi bukan hanya dikenal dengan kota

industri, tapi industri berbudaya,” dorong Hetifah.

Apresiasi pun datang dari Anggota DPR RI Komisi X DPR RI Mujib Rohmat. Menurut legislator Partai Golkar ini, warga Kota Bekasi harus berbangga memiliki budaya etnik daerah yang dilestarikan di Kampung Kranggan. Menurutnya, adat dan tradisi leluhur yang sudah ada sejak abad 15 ini harus tetap dilestarikan oleh generasi muda. Pihaknya pun mendukung Kampung Kranggan untuk memiliki museum agar mendukung berbagai kegiatan kebudayaan.

Sementara dalam sambutannya, Camat Jatisampurna Abi Hurairah menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI ke Kampung Kranggan ini. Menurutnya, Kelurahan Kranggan memiliki kekayaan adat istiadat dan tradisi leluhur. Ia memastikan, Rumah Adat Kranggan yang menjadi lokasi pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan tokoh adat Kranggan pun sudah ditetapkan Wali Kota Bekasi sebagai cagar budaya Kota Bekasi.

Sebelumnya, saat tiba di Kampung Kranggan, Tim Kunspek Komisi X DPR RI disambut pertunjukan ibu-ibu menumbuk padi di lesung dan atraksi palang pintu. Anggota Komisi X DPR RI sangat antusias melihat atraksi itu. Apresiasi pun diberikan kepada anak-anak dan remaja yang mempertunjukkan tari tradisional hingga pencak silat. Aksi mereka menunjukkan tarian dan silat mendapat sambutan meriah. Kuliner khas Kranggan pun tak lupa mendapat apresiasi. ■ sf

“Kemendikbud mencatat keluhan dan rencana apa ke depannya. Depok dekat dengan Jakarta, jadi rencana-rencana tersebut tidak harus menunggu tahun depan. Kemendikbud diundang ke Senayan, dan melalui hasil pertemuan ini, sehingga semua rencana ini bisa di formulasikan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada,” tutup Fikri.

Selain ke Depok, pada hari yang sama Komisi X DPR RI juga melakukan pengawasan ke daerah yang dekat dengan Jakarta, yakni Kota Bogor yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto (F-Demokrat) dan Kota Bekasi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar). ■ cas/sf

Komisi XI Temukan Permasalahan SDM Penerima KUR di Mojokerto

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan perekonomian Indonesia, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang menemui sejumlah permasalahan. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, masih ada permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya teknologi.

Di Mojokerto memproduksi sepatu masih manual. Harusnya kalau mau lebih maju harus menggunakan mesin, sehingga mampu memproduksi dengan cepat dan banyak,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau UMKM sepatu penerima KUR, di Mojokerto, Jawa Timur, Senin (21/1).

Politisi Partai Gerindra ini berjanji akan menyampaikan kepada perbankan agar masyarakat penerima KUR bisa

mendapatkan bantuan peralatan dan teknologi yang lebih modern. “Kalau UMKM ini tidak mendapat dukungan teknologi dan peralatan yang canggih, maka akan sulit bersaing dan mengukir pasar. Dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih, maka akan menambah kualitas dan kepercayaan pasar,” tegas Soepriyatno.

Dalam kesempatan ini, Komisi XI DPR RI menemukan UMKM sepatu penerima KUR dengan jumlah Rp 50 juta, Rp 350 juta, hingga Rp 400 juta dari perbankan.

Soepriyatno juga menambahkan, UMKM sepatu ini merupakan potensi sangat besar yang harus terus dikembangkan. Sehingga diharapkan ke depannya mereka tidak menerima KUR lagi, namun sudah menjadi pengusaha besar.

“Perbankan harus memberikan bantuan dalam bentuk yang lain misalnya berupa bantuan teknologi dan peralatan. Karena dengan teknologi yang memadai, maka akan membantu UMKM di pasaran. Bukan hanya pasar dalam negeri, tapi bisa masuk ke dalam pasar luar negeri,” harap legislator daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan Desember 2018, kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Timur sebesar Rp 490,115 miliar, atau naik 10,36 persen dibandingkan dengan Desember 2017 sebesar Rp 444,096 miliar. Penyaluran kredit pada sektor produktif sebesar Rp 353,795 miliar dengan pangsa 72,19 persen terhadap total kredit perbankan di Jatim.

Kredit pada sektor produktif tersebut mengalami pertumbuhan 11,11 persen dari Desember 2017 sebesar Rp 318,431 miliar. Untuk realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 19,988 Miliar, tumbuh sebesar 28,17 persen secara *year on year* (yoy) dan 22,25 persen secara *year to date* (ytd). ■ skr/sf



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau UMKM sepatu yang menerima bantuan KUR di Mojokerto, Jawa Timur



Foto: Icha/jk

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau UMKM penerima bantuan KUR di NTT

Program KUR Bantu Masyarakat NTT

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pada tahun 2018 pemerintah mengucurkan anggaran untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 12 triliun. Komisi XI DPR RI pun ingin memastikan kecukupan anggaran yang diterima masyarakat sebagai nasabah KUR dalam mengelola produk-produk hasil usahanya. Dari hasil pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat mengaku terbantu dengan adanya KUR.

“Dari hasil pengamatan di lapangan, masyarakat justru merasakan bahwa program KUR ini cukup banyak membantu. Dan mampu mendorong komoditas-komoditas yang ada di NTT, dari teh daun kelor, gula, hingga kerajinan dari kayu cendana,” jelas Agun usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau sentra produksi Teh Daun Kelor di Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (21/1).

Dari peninjauan itu, Agun menilai ada hal yang perlu menjadi perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan KUR di NTT. Menurutnya, perlu adanya gerakan yang

sangat besar atau masif guna peningkatan budi daya daun kelor dan kayu cendana. Terlebih lagi kayu cendana yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama.

“Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga sudah memiliki program untuk pengembangan daun kelor dan cendana. Ternyata KUR yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaannya juga bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp 32 triliun dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi XI DPR RI berharap agar seluruh program-program pemerintah tersebut dapat berkesinambungan dan

dipertahankan, sehingga terus mendukung program KUR. “Alokasi-alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus semakin ditingkatkan, bahkan regulasinya harus semakin disederhanakan. Termasuk KUR juga harus ditingkatkan. Jika semua hal tersebut dilakukan, maka Indonesia akan bebas impor,” yakin Agun.

Agun menambahkan, dengan keberadaan KUR, diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya. Pihaknya akan memastikan program KUR dapat terus berjalan dengan baik. “Kami juga melihat NTT membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, Komisi XI sudah meminta kepada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, agar dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat NTT,” ungkap Agun.

Menurut legislator dapil Jawa Barat X itu, pendidikan keterampilan SDM bagi masyarakat NTT menjadi sangat diperlukan, agar kualitas SDM dapat lebih meningkat sehingga produk-produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang lebih baik. Kunspek ini turut dihadiri mitra kerja Komisi XI DPR RI, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Penyelur KUR, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. ■ **ica/sf**



Foto: Ojij/k

Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Setjen DPR Bahas Persiapan Pelantikan Anggota Dewan 2019-2024

Jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI mulai menggelar Rapat Koordinasi membahas persiapan pelantikan Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 yang akan dilaksanakan bulan Oktober nanti.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan, pihaknya akan mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan menyambut Anggota Dewan terpilih hasil Pemilu 2019.

Beberapa skenario menurut Indra sudah dipersiapkan Setjen DPR RI hingga awal masa persidangan Anggota DPR RI periode 2019-2024 diantaranya keprotokolan, persidangan hingga sarana dan prasarana. “Kita ingin mengantisipasi berbagai hal berkaitan dengan keberadaan

anggota dewan baru nanti,” tambah Indra kepada Parlementaria di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

Sedini mungkin, kami harus mendapatkan data anggota dewan yang terpilih, kami akan langsung mempersiapkan database bagi kepentingan masing-masing Anggota Dewan,”

Meskipun ini adalah agenda rutin lima tahunan, Indra tetap mengajak semua pegawai dan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempersiapkan dan menangani hal ini dengan serius. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Setjen MPR RI dan DPD RI berkaitan dengan acara itu.

“Banyak hal yang berhimpitan dan beririsan dengan kepentingan MPR dan DPD. Kami akan segera berkoordinasi dengan keduanya, termasuk dengan KPU. Sedini mungkin, kami harus mendapatkan data anggota dewan yang terpilih, kami akan langsung mempersiapkan database bagi kepentingan masing-masing Anggota Dewan,” tutur Indra.

Indra menegaskan agar masing-masing unit kerja di Setjen dan BK DPR RI, baik biro dan bagian mencermati skenario masuknya Anggota DPR RI yang baru nanti. “Sehingga betul-betul berjalan *smooth*, mulai sejak diserahkan dari KPU ke kami, kemudian kami layani sampai nanti pada persidangan awal pembentukan Pimpinan Dewan dan AKD,” pungkas Indra. ■ es/sf

Demikian ditekankan Wakil Ketua BURT Nurhayati Monoarfa saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit (RS) Awal Bros sebagai RS *provider* dari PT. Asuransi Jasindo sebagai operator Jamkestama, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/1/2019).

“Dalam pelaksanaannya, banyak saran dan masukan dari Anggota DPR RI terkait permasalahan dan hambatan yang muncul terkait dengan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit *provider* PT. Jasindo baik di Jakarta maupun di daerah-daerah,” ucap Nurhayati.

Ia menuturkan, salah satu yang sering terjadi Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai, disinyalir karena program Jamkestama belum tersosialisasikan dengan baik kepada RS *provider*. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah proses administrasi di RS *provider*.

“Faktor penyebab lainnya adalah masih terdapat beberapa RS *provider* yang belum memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP,” imbuh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

BURT Dorong Peningkatan Pelayanan Jamkestama

Padatnya kegiatan kedewanan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya berimplikasi pada perlunya Anggota Dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai. Karena itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama) bagi pejabat negara terus ditingkatkan.

Senada, Anggota BURT DPR RI Bakri menilai fasilitas RS Awal Bros sudah memenuhi syarat untuk melayani pasien peserta Jamkestama. Hanya saja perlu meningkatkan pelayanan, sehingga pasien

dapat mendapatkan pelayanan standar sesuai peraturan dan ketentuan yang ada.

Ia berharap, dengan fungsi pengawasan yang dilakukan BURT, RS *provider* dapat terus meningkatkan Jamkestama secara optimal dan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2014. Sementara, Permenkes Nomor 55 Tahun 2017 menginstruksikan PT Jasindo sebagai operator program Jamkestama.

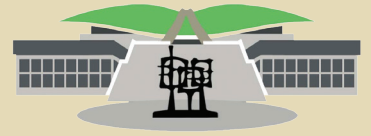
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan agar pelayanan Jamkestama bagi pejabat negara tidak mengganggu pelayanan kepada pasien umum di RS *provider*.

■ ann/sf

Salah satu yang sering terjadi Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai, disinyalir karena program Jamkestama belum tersosialisasikan dengan baik kepada RS *provider*.



Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Nurhayati Monoarfa meninjau fasilitas RS Awal Bros di Makassar



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima audiensi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkalpinang, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senn (21/1). Foto: Runi/rni



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengunjungi Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang, Sumatera Barat, Rabu (23/1). Foto: Andri/rni



Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menerima kunjungan Parlemen Pakistan, di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1). Foto: Jaka/rni